

SALINAN



BUPATI PATI

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 51 TAHUN 2019
TENTANG STANDAR SATUAN HARGA PERJALANAN DINAS DAN
UANG REPRESENTASI KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas kegiatan Perjalanan Dinas Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati, maka Peraturan Bupati Pati Nomor 51 Tahun 2019 tentang Standar Satuan Harga Perjalanan Dinas dan Uang Representasi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2020 perlu disesuaikan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 51 Tahun 2019 Standar Satuan Harga Perjalanan Dinas dan Uang Representasi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Neagara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Standarisasi dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak tetap;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
18. Peraturan . . .

18. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 21);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 102);
21. Peraturan Bupati Pati Nomor 51 Tahun 2019 tentang Standar Satuan Harga Perjalanan Dinas dan Uang Representasi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2019 Nomor 52);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 51 TAHUN 2019 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA DAN BIAYA PERJALANAN DINAS DAN UANG REPRESENTASI KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2020.

Pasal I

Lampiran Peraturan Bupati Pati Nomor 51 Tahun 2019 tentang Standar Satuan Harga Perjalanan Dinas dan Uang Representasi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2019 Nomor 52) diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 7 Februari 2020
BUPATI PATI,

ttd.

HARYANTO

Diundangkan di Pati
pada tanggal 7 Februari 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd.

SUHARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2020 NOMOR 8



LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI PATI
 NOMOR 8 TAHUN 2020
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 51 TAHUN 2019
 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA PERJALANAN DINAS DAN UANG
 REPRESENTASI KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA DEWAN
 PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2020

STANDAR SATUAN HARGA PERJALANAN DINAS DAN UANG REPRESENTASI KETUA, WAKIL KETUA, DAN
 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2020

| TAHUN | KODE REKENING | | | URAIAN | SATUAN | HARGA | KETERANGAN |
|-------|---------------|---|---|--|------------|-----------|--|
| 2020 | 52215 | | | Belanja perjalanan Dinas | | | |
| 2020 | 52215 | 1 | | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | | | |
| 2020 | 52215 | 1 | 1 | Perjalanan Dinas Dalam Daerah - Uang Harian - Tk. A -Ketua DPRD | orang/hari | 350,000 | Perjalanan Dinas Dalam Daerah dapat diberikan apabila melaksanakan perjalanan minimal 3 jam dan jarak tempuh minimal 5 km dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju. |
| 2020 | 52215 | 1 | 2 | Perjalanan Dinas Dalam Daerah - Uang Harian- Tk. B - Wkl. Ketua DPRD | orang/hari | 300,000 | |
| 2020 | 52215 | 1 | 3 | Perjalanan Dinas Dalam Daerah - Uang Harian - Tk. C - Anggota DPRD | orang/hari | 250,000 | |
| 2020 | 52215 | 1 | | Perjalanan Dinas Dalam Daerah - Uang representasi Dalam Daerah | | | |
| 2020 | 52215 | 1 | 4 | Perjalanan Dinas Dalam Daerah - Uang representasi Dalam Daerah- Tk. A -Ketua DPRD | orang/hari | 350,000 | Perjalanan Dinas Dalam Daerah merupakan satuan biaya untuk pelaksanaan tugas OPD yang bersifat insidentil dengan ketentuan dalam wilayah batas Kabupaten Pati (PP). |
| 2020 | 52215 | 1 | 5 | Perjalanan Dinas Dalam Daerah - Uang representasi Dalam Daerah - Tk. B - Wkl. Ketua DPRD | orang/hari | 250,000 | |
| 2020 | 52215 | 1 | 6 | Perjalanan Dinas Dalam Daerah - Uang representasi Dalam Daerah- Tk. C -Anggota DPRD | orang/hari | 200,000 | |
| 2020 | 52215 | 2 | | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah - PP dalam Sehari | | | |
| 2020 | 52215 | 2 | 1 | Perjalanan Dinas Luar Daerah - PP dalam Sehari - Uang Harian - Tk. A - Ketua DPRD | orang/hari | 1,000,000 | Apabila perjalanan dinas luar daerah menggunakan kendaraan umum, dibayarkan sesuai tarif yang berlaku (at cost). |
| 2020 | 52215 | 2 | 2 | Perjalanan Dinas Luar Daerah - PP dalam Sehari - Uang Harian - Tk. B - Wkl. Ketua DPRD | orang/hari | 750,000 | |

| TAHUN | KODE REKENING | | | URAIAN | SATUAN | HARGA | KETERANGAN |
|-------------|---------------|----------|----|--|------------|-----------|---|
| 2020 | 52215 | 2 | 3 | Perjalanan Dinas Luar Daerah - PP dalam Sehari - Uang Harian- Tk. C - Anggota DPRD | orang/hari | 500,000 | |
| 2020 | 52215 | 2 | | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah - JATENG / DIY | | | |
| 2020 | 52215 | 2 | 4 | Perjalanan Dinas Luar Daerah - Jateng / DIY- Uang Harian - Tk. A -Ketua DPRD | orang/hari | 1,500,000 | |
| 2020 | 52215 | 2 | 5 | Perjalanan Dinas Luar Daerah - Jateng / DIY- Uang Harian - Tk. B - Wkl. Ketua DPRD | orang/hari | 1,300,000 | |
| 2020 | 52215 | 2 | 6 | Perjalanan Dinas Luar Daerah - Jateng / DIY- Uang Harian - Tk. C - Anggota DPRD | orang/hari | 1,100,000 | |
| 2020 | 52215 | 2 | | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah - Jatim / Jabar / Banten (Selain Jabodetabek) | | | |
| 2020 | 52215 | 2 | 7 | Perjalanan Dinas Luar Daerah - Jatim / Jabar / Banten (Selain Jabodetabek)- Uang Harian - Tk.A - Ketua DPRD | orang/hari | 2,200,000 | Khusus untuk kegiatan diklat teknis fungsional, kursus, dan peningkatan SDM lainnya yang akomodasinya ditanggung Panitia diberikan uang harian sebesar 50%, sedangkan untuk hari pertama dan terakhir yang akomodasi tidak ditanggung Panitia diberikan 100%. |
| 2020 | 52215 | 2 | 8 | Perjalanan Dinas Luar Daerah - Jatim / Jabar / Banten (Selain Jabodetabek)- Uang Harian - Tk. B- Wkl. Ketua DPRD | orang/hari | 1,950,000 | |
| 2020 | 52215 | 2 | 9 | Perjalanan Dinas Luar Daerah - Jatim / Jabar / Banten (Selain Jabodetabek) - Uang Harian - Tk. C- Anggota DPRD | orang/hari | 1,650,000 | |
| 2020 | 52215 | 2 | | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah - Jabodetabek | | | |
| 2020 | 52215 | 2 | 10 | Perjalanan Dinas Luar Daerah - Jabodetabek- Uang Harian - Tk. A - Ketua DPRD | orang/hari | 2,300,000 | |
| 2020 | 52215 | 2 | 11 | Perjalanan Dinas Luar Daerah - Jabodetabek- Uang Harian - Tk. B - Wkl. Ketua DPRD | orang/hari | 2,100,000 | |
| 2020 | 52215 | 2 | 12 | Perjalanan Dinas Luar Daerah - Jabodetabek- Uang Harian - Tk. C - Anggota DPRD | orang/hari | 1,800,000 | |

| TAHUN | KODE REKENING | | | URAIAN | SATUAN | HARGA | KETERANGAN |
|-------|---------------|---|----|--|------------|-----------|---|
| 2020 | 52215 | 2 | | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah - Luar Jawa | | | |
| 2020 | 52215 | 2 | 13 | Perjalanan Dinas Luar Daerah - Luar Jawa - Uang Harian - Tk. A - Ketua DPRD | orang/hari | 2,400,000 | |
| 2020 | 52215 | 2 | 14 | Perjalanan Dinas Luar Daerah - Luar Jawa - Uang Harian - Tk. B - Wkl. Ketua DPRD | orang/hari | 2,200,000 | |
| 2020 | 52215 | 2 | 15 | Perjalanan Dinas Luar Daerah - Luar Jawa - Uang Harian - Tk. C - Anggota DPRD | orang/hari | 1,900,000 | |
| 2020 | 52215 | 2 | | Uang Transportasi - Tiket Pesawat | | | |
| 2020 | 52215 | 2 | 16 | Perjalanan Dinas Luar Daerah - Uang Transportasi - Tiket Pesawat 1 | orang | 5,000,000 | Fasilitas Transportasi : |
| 2020 | 52215 | 2 | 17 | Perjalanan Dinas Luar Daerah - Uang Transportasi -Tiket Pesawat 2 | orang | 2,500,000 | - Tk. A : Pswt Udara (Bisnis)/ kereta api luxury dan priority |
| 2020 | 52215 | 2 | 18 | Perjalanan Dinas Luar Daerah - Uang Transportasi -Tiket Pesawat 3 | orang | 1,500,000 | - Tk. B : Pswt Udara (Bisnis)/ kereta api luxury dan priority |
| 2020 | 52215 | 2 | 19 | Perjalanan Dinas Luar Daerah - Uang Transportasi - Tiket Pesawat 4 | orang | 1,250,000 | - Tk. C : Pswt Udara (Ekonomi) /kereta api eksekutif, luxury dan priority |
| 2020 | 52215 | 2 | 20 | Perjalanan Dinas Luar Daerah - Uang Transportasi -Tiket Pesawat 5 | orang | 1,000,000 | |
| 2020 | 52215 | 2 | 21 | Perjalanan Dinas Luar Daerah - Uang Transportasi -Tiket Pesawat 6 | orang | 750,000 | Perjalanan dinas ke luar Jawa diperbolehkan menggunakan pesawat udara. |
| 2020 | 52215 | 2 | 22 | Perjalanan Dinas Luar Daerah - Uang Transportasi -Tiket Pesawat 7 | orang | 500,000 | |
| 2020 | 52215 | 2 | | Uang Transportasi - Tiket Kereta Api | | | |
| 2020 | 52215 | 2 | 23 | Perjalanan Dinas Luar Daerah - Uang Transportasi - Tiket Kereta Api (luxury) | orang | 1,300,000 | |
| 2020 | 52215 | 2 | 24 | Perjalanan Dinas Luar Daerah - Uang Transportasi -Tiket Kereta Api 1 | orang | 450,000 | |

| TAHUN | KODE REKENING | | | URAIAN | SATUAN | HARGA | KETERANGAN |
|-------------|---------------|----------|----|--|------------|-----------|--|
| | | | | | | | |
| 2020 | 52215 | 2 | 25 | Perjalanan Dinas Luar Daerah - Uang Transportasi -Tiket Kereta Api 2 | orang | 400,000 | |
| 2020 | 52215 | 2 | 26 | Perjalanan Dinas Luar Daerah - Uang Transportasi -Tiket Kereta Api 3 | orang | 300,000 | |
| 2020 | 52215 | 2 | | Perjalanan Dinas Luar Daerah - Uang Penginapan | | | |
| 2020 | 52215 | 2 | 27 | Perjalanan Dinas Luar Daerah - Uang Penginapan Hotel Bintang 5 A | orang/hari | 3,500,000 | Fasilitas Hotel : |
| 2020 | 52215 | 2 | 28 | Perjalanan Dinas Luar Daerah - Uang Penginapan Hotel Bintang 5 B | orang/hari | 2,500,000 | Tingkat A: Hotel Bintang 5, |
| 2020 | 52215 | 2 | 29 | Perjalanan Dinas Luar Daerah - Uang Penginapan Hotel Bintang 4 A | orang/hari | 2,000,000 | Tingkat B : Hotel Bintang 4, |
| 2020 | 52215 | 2 | 30 | Perjalanan Dinas Luar Daerah - Uang Penginapan Hotel Bintang 4 B | orang/hari | 1,500,000 | Tingkat C: Hotel Bintang 3. |
| 2020 | 52215 | 2 | 31 | Perjalanan Dinas Luar Daerah - Uang Penginapan Hotel Bintang 3 A | orang/hari | 1,000,000 | |
| 2020 | 52215 | 2 | 32 | Perjalanan Dinas Luar Daerah - Uang Penginapan Hotel Bintang 3 B | orang/hari | 750,000 | Dalam hal menggunakan fasilitas penginapan dalam perjalanan dinas, mekanisme pertanggung jawaban disesuaikan dengan bukti pengeluaran yang sah dan tidak melebihi batas ketentuan Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri. |
| 2020 | 52215 | 2 | | Perjalanan Dinas Luar Daerah - Uang Representasi Provinsi Jawa Tengah | | | |
| 2020 | 52215 | 2 | 33 | Perjalanan Dinas Luar Daerah - Uang Representasi Provinsi Jawa Tengah- Tk. A - Ketua DPRD | orang/hari | 750,000 | Apabila di provinsi yang dituju tidak terdapat hotel sesuai fasilitas hotel, maka yang bersangkutan diberi tarif kamar hotel sesuai dengan Tarif Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri. |
| 2020 | 52215 | 2 | 34 | Perjalanan Dinas Luar Daerah - Uang Representasi Provinsi Jawa Tengah- Tk. B - Wkl. Ketua DPRD | orang/hari | 600,000 | |
| 2020 | 52215 | 2 | 35 | Perjalanan Dinas Luar Daerah - Uang Representasi Provinsi Jawa Tengah- Tk. C - Anggota DPRD | orang/hari | 400,000 | |

| TAHUN | KODE REKENING | | | URAIAN | SATUAN | HARGA | KETERANGAN |
|-------|---------------|---|----|---|--------------|---------|---|
| 2020 | 52215 | 2 | | Perjalanan Dinas Luar Daerah - Uang Representasi Luar Provinsi Jawa Tengah | | | |
| 2020 | 52215 | 2 | 36 | Perjalanan Dinas Luar Daerah - Uang Representasi Luar Provinsi Jawa Tengah- Ketua DPRD | orang/hari | 900,000 | |
| 2020 | 52215 | 2 | 37 | Perjalanan Dinas Luar Daerah - Uang Representasi Luar Provinsi Jawa Tengah- Wkl. Ketua DPRD | orang/hari | 750,000 | |
| 2020 | 52215 | 2 | 38 | Perjalanan Dinas Luar Daerah - Uang Representasi Luar Provinsi Jawa Tengah- Anggota DPRD | orang/hari | 500,000 | |
| 2020 | 52215 | 2 | 39 | Perjalanan Dinas Luar Daerah - Uang Taxi Ketua DPRD/ Wakil Ketua DPRD Wilayah DIY | orang/pp | 250,000 | Uang taxi adalah biaya taxi dari bandara/stasiun/ terminal ke tempat tujuan pulang - pergi. |
| 2020 | 52215 | 2 | 40 | Perjalanan Dinas Luar Daerah - Uang Taxi anggota DPRD Wilayah DIY | orang/pp | 250,000 | |
| 2020 | 52215 | 2 | 41 | Perjalanan Dinas Luar Daerah - Uang Taxi Ketua DPRD/ Wakil Ketua DPRD Wilayah Jatim, Jabar, Banten (Selain Jabodetabek) | orang/pp | 500,000 | |
| 2020 | 52215 | 2 | 42 | Perjalanan Dinas Luar Daerah - Uang Taxi Anggota DPRD Wilayah Jatim, Jabar, Banten (Selain Jabodetabek) | orang/pp | 400,000 | |
| 2020 | 52215 | 2 | 43 | Perjalanan Dinas Luar Daerah - Uang Taxi Ketua DPRD/ Wakil Ketua DPRD Wilayah Jabodetabek | orang/pp | 800,000 | |
| 2020 | 52215 | 2 | 44 | Perjalanan Dinas Luar Daerah - Uang Taxi Anggota DPRD Wilayah Jabodetabek | orang/pp | 600,000 | |
| 2020 | 52215 | 2 | 45 | Perjalanan Dinas Luar Daerah - Uang Taxi Ketua DPRD/ Wakil Ketua DPRD Wilayah Luar Jawa | orang/pp | 800,000 | |
| 2020 | 52215 | 2 | 46 | Perjalanan Dinas Luar Daerah - Uang Taxi Anggota DPRD Wilayah Luar Jawa | orang/pp | 600,000 | |
| | | | | | | | |
| 2020 | 52215 | 2 | | Perjalanan Dinas Luar Daerah - Uang e-Toll | | | |
| | | | 47 | Biaya e-Toll - Paket 1 | Pergi-Pulang | 50,000 | |
| | | | 48 | Biaya e-Toll - Paket 2 | Pergi-Pulang | 100,000 | |

| TAHUN | KODE REKENING | | URAIAN | SATUAN | HARGA | KETERANGAN |
|-------|---------------|----|---|--------------|---------|--|
| | | 49 | Biaya e-Toll - Paket 3 | Pergi-Pulang | 200,000 | |
| | | 50 | Biaya e-Toll - Paket 4 | Pergi-Pulang | 300,000 | |
| | | 51 | Biaya e-Toll - Paket 5 | Pergi-Pulang | 500,000 | |
| 2020 | 52215 | 3 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri | | | Perjalanan Dinas Luar Negeri berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Keuangan Tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2020. |



BUPATI PATI,

ttd.

HARYANTO